

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang di dapatkan oleh peneliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk meneliti mengenai penerapan akuntansi lingkungan atas pengelolaan limbah pada PT. Sumber Graha Sejahtera antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Jurnal, Tahun	Peneliti,	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah pada PG DJATIROTO Desa Kaliboto, Lumajang, Nilasari (2014)	Fitri	komponen biaya lingkungan terkait pengelolaan limbah serta untuk menganalisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan terhadap pengelolaan limbah	Metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan (dalam pengelolaan limbah) dan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan. Pencatatan yang dilakukan Pabrik Gula Djatiroto untuk biaya pengelolaan limbah dengan cara memasukkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut ke dalam perkiraan instalasi limbah udara, instalasi limbah cair, instalasi limbah padat dengan menggunakan metode <i>accrual basis</i> seperti pengakuan. Bahan yang digunakan dalam pengelolaan limbah akandicatat oleh bagian gudang sebagai persediaan, dan akandicatat sebagai

No	Jurnal, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>biaya oleh bagian akuntansi jika terdapat aktifitas operasional. Dalam hal pencatatan bahan pengelolaan limbah sudah tepat sesuai dengan definisi persediaan menurut PSAK No.14. Pabrik Gula Djatiroto telah menyajikan informasi mengenai biaya pengelolaan limbah dalam Laporan Laba Rugi dalam perkiraan Pabrik. Biaya tersebut merupakan komponen dari harga pokok penjualan. Pabrik memang tidak membuat laporan khusus tentang biaya lingkungan seperti PSAK No.1 paragraf 09, namun pabrik telah menyajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Pabrik juga telah mengungkapkan kebijakan akuntansi biaya lingkungan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.</p>
2	<p>Analisis Penerapan Biaya Akuntansi Lingkungan pada PT Perkebunan Nusantara V Sei Rokan, Nurul Hidayati (2016)</p>	<p>mengetahui dan menganalisis bagaimana perusahaan mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan</p>	<p>Metode kualitatif</p>	<p>Hasilnya menunjukkan perusahaan dalam mengakui biaya operasional pengelolaan limbah dimasukkan sebagai komponen biaya produksi dengan pertimbangan bahwa limbah timbul akibat proses produksi. Pengungkapan masalah lingkungan hidup dalam laporan keuangan sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi yang berlaku, sehingga penerapannya sesuai kebijakan masing-masing perusahaan</p>

No	Jurnal, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Penerapan Akuntansi Lingkungan Untuk Mengoptimalkan Tanggung Jawab Industri Gula Pada PT Perkebunan Nusantara X Unit Pabrik Gula Lestari Nganjuk, Susiana Sari (2013)	mengidentifikasi dan menjelaskan akuntansi lingkungan dan kegiatan lingkungan dalam rangka mengoptimalkan tanggung jawab sosial di Pabrik Gula Lestari	Metode kualitatif	Berdasarkan analisis menunjukkan hasil bahwa Pabrik Gula Lestari telah menerapkan akuntansi lingkungan tetapi biaya reboisasi dianggarkan dengan biaya sumbangan. Analisis juga mengungkapkan bahwa Instalasi Manajemen Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan mesin bowler membutuhkan biaya pemeliharaan tambahan untuk meminimalkan polusi sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat
4	Pengungkapan Biaya Lingkungan dan Penilaian Kinerja Lingkungan pada Perusahaan batu bara PT Prima Multi Arta, Sonia Betharia Sehaputri Manurung (2018)	untuk mengetahui bagaimana pengungkapan komponen-komponen biaya lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan jika dihubungkan dengan teori yang ada, serta untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan	Metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Perusahaan masih belum melakukan praktik akuntansi berupa pengungkapan dan pelaporan biaya lingkungan secara menyeluruh, karena pencatatan biaya-biaya masih digabung dengan biaya operasional lain di dalam laporan kas harian dan tidak dituangkan ke dalam suatu laporan khusus yang merinci komponen biaya lingkungan secara lengkap dan terpisah, namun sudah ada upaya positif untuk menyediakan rincian sederhana walaupun hanya seputar pengelolaan limbah

No	Jurnal, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>yang bisa dianggap sebagai bentuk pengungkapan sukarela (<i>voluntary disclosure</i>) oleh perusahaan</p> <p>2. Perusahaan dinilai telah menjalankan seluruh kegiatan operasinya sebagai perusahaan tambang batubara dengan patuh dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta dinas terkait yang berlaku di Indonesia.</p> <p>3. Berkenaan dengan tanggung jawab lingkungan perusahaan berupa pengelolaan limbah, pencegahan dan pengurangan pencemaran, realisasi reklamasi dan pascatambang, serta hubungan baik bahkan saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, yang telah dibuktikan dengan melakukan studi terhadap data keuangan perusahaan serta observasi langsung di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan perusahaan sudah cukup optimal sesuai pernyataan pihak perusahaan kepada peneliti</p>
5	Analisis Penerapan Akuntansi	untuk menganalisis	Metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui

No	Lingkungan terhadap Jurnal, Peneliti, Tahun	komponen Fokus Penelitian	Metode Penelitian	bahwa perusahaan telah Hasil Penelitian
	Pengelolaan Limbah pada Pabrik Gula Semboro Jember, Siska Ayu Pratiwi (2017)	biaya lingkungan terkait pengelolaan limbah serta menganalisis perlakuan akuntansi biaya lingkungan terhadap pengelolaan limbah		melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan dalam pengelolaan limbah dan telah melakukan perlakuan akuntansi biaya lingkungan. Akan tetapi berdasarkan analisis yang telah dilakukan ada beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi PG Semboro dalam hal penerapan akuntansi lingkungan untuk masa yang akan datang
6	Analisis Perlakuan Akuntansi atas Biaya Lingkungan pada PT Sejahtera Usaha Bersama Unit Jember, Pramitha Arinda Hartono Putri (2016)	Untuk menganalisis bagaimana perusahaan mengidentifikasi, mengakui, menilai, menyajikan dan mengungkapkan biaya lingkungan pada laporan keuangannya	Metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama Unit Jember mengakui biaya lingkungan seperti biaya investasi atas IPAL, biaya operasional atas kegiatan pengolahan limbah dan biaya riset. PT SUB unit Jember telah melakukan pengungkapan informasi terkait biaya lingkungan, khususnya biaya pengolahan limbah. Namun belum menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup secara khusus, sehingga belum bisa dikatakan sesuai dengan PSAK No.1 tahun 2015 paragraf 14.
7	Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Laba Perusahaan Pt.Imeco Batam TuBular, HendryJaya (2015)	Biaya-biaya lingkungan yang dapat mempengaruhi laba	Metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian PT Imeco Batam Tubular diperoleh bahwa perusahaan belum memaksimalkan penerapan akuntansi lingkungan. Perusahaan mengakui biaya lingkungan termasuk biaya lingkungan sekitar dengan pertimbangan bahwa biaya

No	Jurnal, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dalam manajemen upaya layanan saat ini atau pembuangan limbah dan biaya akan mempengaruhi keuntungan perusahaan
8	<i>The Impact of Green Accounting for Reducing the Environmental Cost in Production Companies</i> , Ali Mustafa Magablih Universitas Nasional Irbid, Yordania (2017)	<i>Environmental disclosure costs</i>	<i>Qualitative</i>	<i>A study came to the most important result that there were no statistically significant difference between the arithmetic average of the possibility of measuring the environment cost of disclosure, and the study also recommends the allocation of the budget to preserve and protect the environment and the budget of social cost, the development of accounting methods in order to provide environmental information to make sound decisions to exploit these resources.</i>

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Akuntansi Lingkungan atas Pengelolaan Limbah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramitha Arinda Hartono Putri. Hasil penelitian yang dilakukannya mengungkapkan bahwa PT. Sejahtera Usaha Bersama Unit Jember telah mengakui biaya lingkungan yang terdiri dari biaya investasi atas IPAL dan mesin boiler, biaya operasional atas kegiatan pengolahan limbah diakui sebagai beban umum dan administrasi, biaya riset yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga keseimbangan lingkungan diakui sebagai beban retribusi dan pajak daerah. Persamaan antara penelitian yang

akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah tema dari penelitian ini, yaitu analisis penerapan akuntansi lingkungan pada suatu entitas.

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun periode 2019
2. Objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada PT. Sumber Graha Sejahtera Diwek Jombang, dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

2.2 TINJAUAN TEORI

2.2.1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan dimasa mendatang. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan

menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat (Soelistyoningrum, 2011). Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

Teori legitimasi penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh batasan-batasan, norma-norma, nilai-nilai dan peraturan sosial yang membatasi perusahaan agar memperhatikan kepentingan sosial dan dampak dari reaksi sosial yang dapat ditimbulkan. Dengan melakukan pengungkapan sosial (kinerja lingkungan), perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

Organisasi yang dianggap sah atau *legitimate*, lebih dipandang sebagai organisasi yang dipercaya, layak, bermakna dan memiliki prediksi. Selain itu, organisasi dianggap lebih *legitimate* bilamana organisasi tersebut mudah untuk dimengerti, bukan hanya sekedar diinginkan (Budiani, 2011: 26).

2.2.2 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.

Menurut Muid (2011), *Stakeholders theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, analis, dan pihak lain). Perusahaan tidak dapat melepaskan

diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Nor Hadi, 2011:94-95).

Apabila perusahaan mampu menyeimbangkan kepentingan dari para stakeholder ini, maka perusahaan akan mendapatkan dukungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori stakeholder, masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan (Andreas, 2011:5).

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder mereka. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.

Menurut Jones dalam Indrawan (2011) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a) Inside stakeholder, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah pemegang saham dan karyawan.

b) Outside stakeholder, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum.

2.2.3 Akuntansi Lingkungan

2.2.3.1 Pengertian Akuntansi Lingkungan

American Insitute of Certified Public Accounting (AICPA) Menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya dan meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada umumnya yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil. Menurut Kieso dan Weygandt (2015, hal.4), akuntansi ialah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Wahyudi (2012) akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stakeholder* perusahaan.

Sedangkan menurut Utami (2012) menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan sebagai istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah.

Menurut Prof.Dr. Andreas Lako (2018: 82), Akuntansi Lingkungan adalah suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi berkenaan dengan transaksi, peristiwa, dan atau objek keuangan, sosial, dan lingkungan secara terpadu dalam proses akuntansi agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terpadu, utuh, dan relevan yang berguna bagi pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan non ekonomi.

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA) dalam Ikhsan (2009:15), akuntansi lingkungan merupakan fungsi yang menggambarkan biaya-biaya lingkungan yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan perusahaan didalam pengidentifikasian cara-cara yang dapat mengurangi atau menghindari biaya-biaya pada waktu yang bersamaan dengan usaha memperbaiki kualitas lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan merupakan sebuah proses identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya lingkungan yang digunakan oleh perusahaan sebagai upaya pencegahan, pengurangan, ataupun penghindaran terhadap dampak lingkungan yang perlu disampaikan kepada para *stakeholder* perusahaan untuk pengambilan keputusan.

2.2.3.2 Tujuan Akuntansi Lingkungan

Tujuan akuntansi lingkungan itu sendiri adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Menurut Ikhsan (2009) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan yaitu sebagai berikut :

1. Akuntansi lingkungan merupakan alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, sebagai alat komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

2.2.3.3 Manfaat Akuntansi Lingkungan

Bila biaya-biaya secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Manfaat-manfaat dari mengadopsi akuntansi lingkungan menurut Andreas Lako (2014:41) meliputi:

- a. Aktivitas ekonomi, penghasilan dan kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat, sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Perkembangan bisnis perusahaan semakin lancar karena reputasi dan citra perusahaan semakin dikenal luas dan diterima oleh klien nasional serta multinasional sehingga meningkatkan pangsa pasar perusahaan.
- b. Lingkungan perusahaan semakin hijau dan nyaman serta memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi (manfaat sosial dan ekologi) kepada perusahaan dan masyarakat.
- c. Perusahaan memiliki relasi yang baik dan mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat.
- d. Meningkatkan citra, reputasi, nama baik, apresiasi dan pengakuan dari para stakeholder, terutama para pemegang saham, investor, kreditor, pemasok, pelanggan, mitra bisnis dan masyarakat luas semakin meningkat.
- e. Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi limbah.
- f. Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- g. Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya kompetitif.
- h. Untuk keberlanjutan bisnis dan laba dalam jangka panjang.

2.2.4 Pengertian Biaya Lingkungan

Menurut Hansen dan Mowen (2011) mendefinisikan biaya lingkungan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak atau biaya-biaya untuk mencegah terjadinya kerusakan dimasa depan. Biaya lingkungan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Biaya lingkungan langsung adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada objek (misalnya biaya tenaga kerja akibat proses, biaya manajer untuk suatu produk, biaya penggunaan energi untuk produk).
2. Biaya lingkungan tidak langsung adalah biaya yang dialokasikan untuk biaya objek (biaya pelatihan mengenai lingkungan, biaya gaji manajer lingkungan, biaya pembelian produk yang tidak berpengaruh langsung terhadap proses).

2.2.5 Limbah

2.2.5.1 Pengertian Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan produksi. Berdasarkan pengertian limbah yang telah dijelaskan di atas, limbah dapat diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan dari rumah tangga, industri, pertambangan, dan kegiatan lain yang merupakan bahan berbahaya dan beracun bagi lingkungan sekitar.

2.2.5.2 Landasan Hukum yang mengatur Limbah

Pelaksanaan pengelolaan limbah harus dilakukan sesuai dengan dasar peraturan yang berlaku. peraturan-peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Jombang No.3 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
2. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 6 , “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.
3. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14, “Untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
4. Peraturan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Permen Lingkungan Hidup No.11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atas kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
5. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, Pasal 22 mengisyaratkan akan pentingnya kesehatan lingkungan melalui antara lain pengamanan limbah padat dan cair.

6. Peraturan Pemerintah, PP 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air .

2.2.5.3 Aspek Pembiayaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Komponen biaya yang dapat diatribusikan langsung berdasarkan PSAK No.16 tentang Aset Tetap antara lain :

1. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap
2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
3. Biaya handling dan penyerahan awal
4. Biaya perakitan dan instalasi
5. Biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik. Setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut
6. Komisi professional

Menurut Wiyoko (1997) dalam Ridlo (2016), secara garis besar pos biaya yang diperlukan untuk IPAL adalah :

1. Biaya investasi tanah
2. Biaya konstruksi IPAL dan peralatannya
 - a. Biaya dan konstruksi beton dan sejenisnya
 - b. Peralatan pompa yang menunjang sistem IPAL
 - c. Instalasi listrik untuk menggerak peralatan IPAL

2. Biaya operasional IPAL

- a. Pemakaian bahan kimia
- b. Gaji operator IPAL
- c. Biaya rekening listrik
- d. Biaya pemeliharaan peralatan IPAL
- e. Biaya pemeliharaan bangunan IPAL
- f. Biaya pemeliharaan efisiensi IPAL

3. Pos biaya lain yang sesuai dengan jenis metode dan kebijaksanaan yang diterapkan pada perusahaan

2.2.6 Pengertian Biaya (*cost*) dan Beban (*Expense*)

Menurut Sprouse dan Monits dalam bukunya Suwardjono (2014), istilah *cost* atau biaya adalah suatu pengorbanan untuk mendapatkan manfaat dan pengukurannya sesuai harga pertukaran. Sedangkan istilah *expense* atau beban adalah penurunan aset sebagai akibat penggunaan ekonomi dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak maupun unit pemerintah.

Biaya IPAL yang timbul mengandung kos (*cost*) yang dapat diakui dahulu sebagai aset dan baru kemudian diakui sebagai biaya pada aset tersebut telah keluar dari kesatuan usaha dan mendatangkan pendapatan atau kos tersebut diperlakukan sebagai biaya (*expense*). Biaya mempresentasikan manfaat ekonomik, bila kos diperlakukan sebagai aset, kos itu disebut sebagai kos belum habis atau tidak terhabiskan (*unexpired cost*) artinya kos belum habis dimanfaatkan dalam menghasilkan pendapatan. Bila manfaat ekonomik telah digunakan dalam mendatangkan pendapatan, bagian dari kos aset yang

mempresentasikan manfaat yang telah dihabiskan disebut dengan kos terhabiskan (*expired cost*) dan menjadi pengukur biaya (swardjono,2014).

IPAL yang timbul dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu (Rosy,2015 dalam Naufal,2016):

1. *Unexpired Cost*

Meliputi tanah, bangunan, dan prasarana mekanikal dan elektrikal IPAL, terdapat tiga kriteria agar suatu pos diakui sebagai aset yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya manfaat ekonomik dimasa mendatang,dimana aset yang dimaksud akan menghasilkan manfaat dimasa datang berupa citra baik dari masyarakat dan bebas dari sanksi/tindakan penertiban dari pemerintah
- b. Diperoleh atau dikendalikan dari kesatuan usaha, dimana aset yang dimaksud memang diusahakan oleh perusahaan untuk suatu tujuan
- c. Sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu, dimana transaksi biaya investasi tanah, bangunan dan prasarana peralatan mekanikal dan elektrikal IPAL adalah transaksi atau peristiwa masa lalu

2. *Expired Cost*

Meliputi biaya operasional IPAL. Biaya operasional IPAL ini dapat dikategorikan sebagai biaya produksi. Hal ini dikarenakan biaya ini timbul akibat adanya kegiatan operasional. Kegiatan operasional IPAL merupakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup (PLH). Kegiatan pengelolaan limbah cair atau sampah industri lainnya, dapat dipersamakan dengan PLH

yang dimaksud. Atas biaya PLH tersebut dibebankan sebagai biaya produksi pada periode dimana biaya itu timbul, sehingga biaya operasional IPAL juga dapat dibebankan sebagai biaya produksi.

2.2.7 Tahap Tahap Perlakuan Akuntansi Lingkungan

Sebelum mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, dan efek sosial masyarakat lainnya, perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan pembiayaan tersebut. Pencatatan pembiayaan untuk mengelola sampah-sampah yang dikeluarkan dari hasil sisa produksi suatu usaha dialokasikan dalam tahap-tahap tertentu yang masing-masing tahap memerlukan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tahap-tahap pencatatan itu dapat dilakukan sebelum periode akuntansi berjalan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan tersebut. Agar pengalokasian anggaran yang telah dipersiapkan untuk satu tahun periode akuntansi tersebut dapat diterapkan secara tepat dan efisien, maka tahap-tahap perlakuan akuntansi lingkungan terkait biaya lingkungan berdasarkan PSAK 1 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi

Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan eksternalitas yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak negatif tersebut. Macam-macam kemungkinan dampak ini diidentifikasi sesuai dengan bobot dampak negatif yang mungkin timbul.

Menurut Suwardjono (2009) mengidentifikasi berarti mengenali suatu objek transaksi dan menentukan apakah objek tersebut telah memenuhi kriteria untuk diukur dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

2. Pengakuan

Menurut Suwardjono (2009) mengakui atau pengakuan berarti memasukkan angka hasil pengukuran (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga angka (kos) tersebut terefleksi atau termuat dalam laporan keuangan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan dapat diakui sebagai beban dalam laporan keuangan.

Prinsip Akuntansi Berterima Umum memberikan pedoman tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan atau beban. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 82 tahun 2015, pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pos yang memenuhi unsur untuk diakui adalah sebagai berikut :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari/ke dalam perusahaan
 - b. Pos tersebut mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur dengan andal
- (Antonius, 2016).

3 Pengukuran

Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan

moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil setiap periode. Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda.

Berdasarkan KDPPLK paragraf 99 tahun 2015, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan menurut Suwardjono (2009), pengukuran (*measurement*) adalah penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukur suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah hasil pengukuran tersebut akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dasar pengukuran yang dapat digunakan menurut KDPPLK paragraf 100 tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Biaya historis

Aset dicatat sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan atau sebesar nilai wajar untuk mendapatkan aset tersebut pada saat perolehan.

b. Biaya kini (*current cost*)

Aset dinilai sejumlah kas atau setara kas bila aset yang sama atau setara aset diperoleh saat ini.

c. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)

Aset dinyatakan sejumlah kas atau setara kas yang akan didapatkan saat ini dengan menjual aset pada pelepasan normal.

d. Nilai sekarang (*present value*)

Aset dinyatakan sejumlah arus kas bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

4 Penyajian

Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama sama dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut. Penyajian informasi mengenai biaya lingkungan telah diatur dalam PSAK No. 1 Tahun 2015, paragraf dua belas (12) yang menyatakan :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

5 Pengungkapan

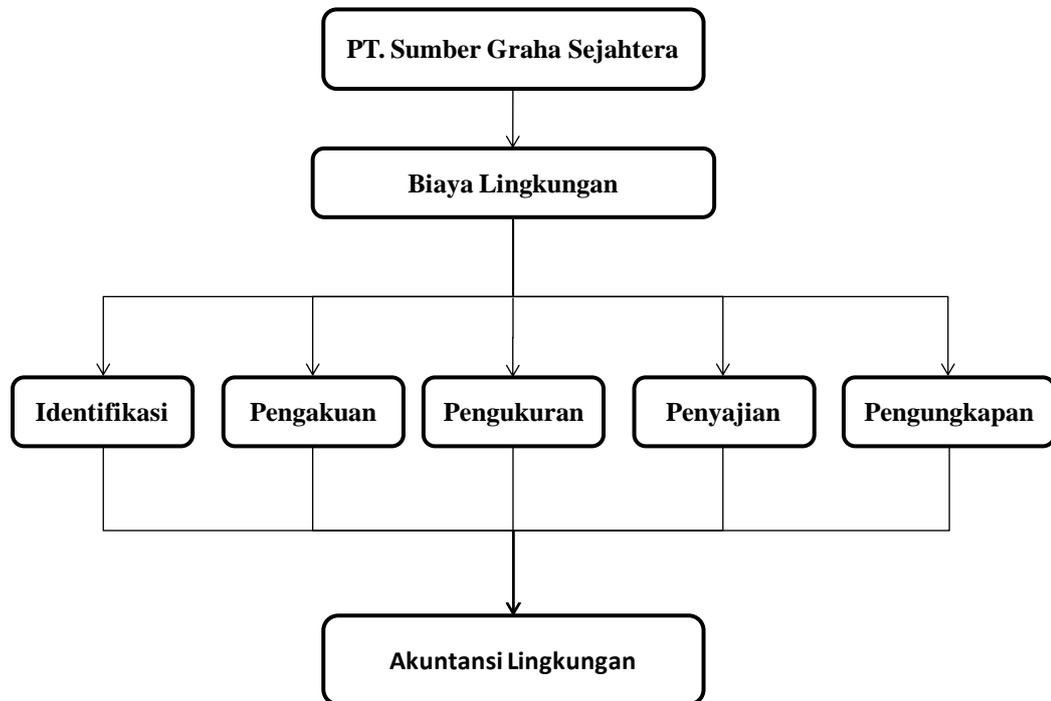
Menurut Suwardjono (2009) standar pengungkapan suatu kejadian biasanya menetapkan apakah suatu informasi harus disajikan secara terpisah dari laporan keuangan utama, apakah informasi tersebut digabungkan dengan pos laporan yang lain, ataukah perlu dirinci dan lain sebagainya.

Dalam PSAK No.1 paragraf 117 tahun 2015 tentang pengungkapan laporan keuangan disebutkan bahwa :

“Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan: (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan: (b) kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan”.

Ditinjau dari tujuan pemberian informasi akuntansi, maka pengungkapan informasi lingkungan adalah perusahaan dengan pemakainya guna pertimbangan ekonomis dan keputusan yang rasional. Berbagai informasi tentang lingkungan baik yang menyangkut tindakan pengurangan dampak negatif maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas perusahaan dapat disajikan agar informasi benar-benar relevan dan *reliable*. Bentuk pengungkapan informasi lingkungan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan, karena sampai saat ini belum ada standar baku yang mengaturnya (Amalia, 2010).

2.3 KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Berdasarkan PSAK 1 tahun 2015

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek pada PT Sumber Graha Sejahtera Diwek Jombang. PT Sumber Graha Sejahtera adalah sebuah pabrik industri manufaktur yang bergerak dibidang pengolahan kayu lapis. Pada setiap kegiatan operasional perusahaan, pasti akan menghasilkan suatu limbah yang mana membutuhkan biaya dalam pengolahannya, dan untuk mengetahui apakah biaya-biaya tersebut biaya lingkungan atau tidak, maka diperlukan lima tahapan perlakuan biaya lingkungan yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. supaya lebih efisien dalam mengelola biaya lingkungan tersebut maka dibutuhkan penerapan ilmu akuntansi lingkungan. Peneliti

membahas tentang akuntansi lingkungan yang berfokus pada limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT Sumber Graha Sejahtera tersebut.